

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi pada banyak negara di dunia dan menjadi masalah sosial yang bersifat global. Hampir semua negara yang berkembang memiliki masalah kemiskinan. Kemiskinan dipengaruhi oleh banyaknya faktor yang dapat dilihat dari berbagai dimensi di dalamnya antara lain mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, kerentanan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial (Mawardani dan Sudarno 2003)

Kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kedua, kemiskinan relative yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif dapat ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat. Dengan kata lain kemiskinan relative amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro, 2010).

Mengingat kemiskinan merupakan masalah multidimensional maka upaya pengentasan kemiskinan tidak semata-mata menjadi tanggung

jawab pemerintah pusat. Dengan diterapkan otonomi daerah di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dituntut lebih besar dalam rangka pengentasan kemiskinan agar supaya program dan strategi yang dikembangkan tepat sasaran hal ini dikarenakan PEMDA mengetahui betul karakteristik daerahnya. (Muhamad, et al, 2005).

Tabel 1.1
Kemiskinan di Kota Gorontalo tahun 2008-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (persen)
2008	7.90	5.23
2009	8.29	5.29
2010	9.90	5.49
2011	11.04	5.97
2012	10.69	5.61
2013	11.67	5.99
2014	11.64	5.85
2015	12.18	6.05
2016	12.43	6.05
2017	11.95	5.70

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, BPS kota Gorontalo Tahun 2018

Berdasarkan data kondisi kemiskinan di Kota Gorontalo diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Gorontalo selama tahun 2008-2017 mengalami fluktuasi atau naik turun. Dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 7,90 ribu jiwa dengan presentase penduduk miskin sebesar 5,23 persen, di tahun 2016 angka tersebut meningkat drastis sebesar 12,43 ribu jiwa dengan presentase penduduk miskin 6,05 persen, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan

yakni sebesar 11,95 ribu jiwa dengan presentase penduduk miskin 5,70 persen

kemiskinan masih menjadi permasalahan yang besar dan belum ditemukan solusi optimal yang bisa menyelesaikan masalah ini. Sesuai dengan teori pertumbuhan baru, yang sangat menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital). Untuk merealisasikan kebijakan tersebut pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan melalui sekolah dan kesehatan gratis bagi penduduk miskin mengalokasikan pendanaan dalam anggaran belanjanya yang mengharuskan dari total APBN maupun APBD sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan dan UU No 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan agar mengalokasikan 20 persen untuk sector pendidikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan. Pengalokasian dana dirasa perlu karena mengingat sampai saat ini masih banyak sekali penduduk di Kota Gorontalo yang hidup dibawah garis kemiskinan serta masih banyaknya jumlah masyarakat miskin, sehingga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang baik.

Tabel 1.2
Anggaran Pendidikan & Anggaran Kesehatan 2008-2017

Tahun	Anggaran Sektor Pendidikan	Anggaran Sektor Kesehatan	Anggaran Pendidikan %	Anggaran Kesehatan %
2008	134.116.646	59.728.513	5.69	5.00
2009	156.349.018	45.510.057	6.64	3.81
2010	142.973.361	64.207.526	6.07	5.37
2011	200.328.906	92.578.422	8.50	7.75
2012	225.688.237	86.061.394	9.58	7.20
2013	265.277.591	101.973.304	11.26	8.53
2014	322.334.068	116.873.414	13.69	9.78
2015	317.354.205	104.665.331	13.47	8.76
2016	341.674.783	245.897.486	14.51	20.58
2017	248.260.680	276.892.228	10.54	23.18

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan dalam APBD Kota Gorontalo selama tahun 2008-2017. Rata-rata pengeluaran pemerintah Kota Gorontalo di sektor pendidikan meningkat sebesar 99,95 persen pertahun, perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 14,51 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan sebesar terjadi pada tahun 2017 yaitu 10,54 persen. Dan untuk pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Kota Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 99,96 persen pertahun, perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 23,18 persen.

Namun, peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang dianggarkan tidak selalu menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Gorontalo selama tahun 2008-2017. Sebagai contoh, pada tahun 2016

pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan meningkat sebesar Rp. 341.674.783 milyar, dan presentase penduduk miskinnya sebesar 6.05 persen. Namun tidak dibarengi dengan penurunan presentase kemiskinan justru terjadi kenaikan terhadap jumlah presentase penduduk miskin yang di Kota Gorontalo. Sedangkan untuk sektor kesehatan pengeluaran pemerintah pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 276.892.228 milyar dan presentase penduduk miskinnya turun sebesar 5,70 persen

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan total tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun tidak dibarengi dengan jumlah penduduk miskin yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pertanyaanya apakah pengeluaran di setiap sektor tersebut telah di prioritaskan pada bidang yang berpengaruh positif untuk upaya penanggulangan kemiskinan atau tidak. Sehingga penulis perlu melakukan penelitian apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Kota Gorontalo?

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai masukan, pegangan, pertimbangan dan evaluasi dari peningkatan pemerintah dari pihak-pihak yang terkait yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari peneliti ini dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu untuk mengatui masalah pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap kemiskinan yang ada di Kota Gorontalo serta memberikan penanggulanganya terhadap masalah tersebut.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam mendorong perekonomian, pembangunan daerah.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain yang ingin mengulas masalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap kemiskinan dengan objek peneliti yang sama.